

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Badruzaman, Mariam Darus dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.2001.
- Fuady, Munir, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2007.
- Gunanegara, Rakyat dan Negara : Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan : Pelajaran Filsafat, Teori Ilmu dan Jurisprudensi, Jakarta : Tata Nusa. 2008.
- Harsono, Boedi, Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta : Djembatan. 2005.
- HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Jakarta : Rajawali Pers, Edisi Revisi Cetakan ke delapan. 2013.
- Limbong, Bernhard, Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Jakarta : Margaretha Pustaka. 2011.
- Limbong, Bernhard, Konflik Pertanahan, Cetakan Pertama, Jakarta :Margaretha Pustaka. 2012
- Mahendra, A.A. Oka, *Menguak Masalah Hukum, Demokrasi dan Pertanahan*, Cetakan Pertama, Jakarta : Sinar Harapan. 1996.
- Mertokusumo, Sudikno, Mengenai Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty. 2005.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty. 1985.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Jakarta : Rajawali. 2010.
- Muhammad, Abdulkadir, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya. 2000.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004.
- Narbuko, Cholid, dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*, cetakan ke-7, Jakarta : Bumi Aksara. 2005

- Philipus M. Hadjon, et.al., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta, Gajahmada University Press. 2005.
- Prajitno, A.A. Andi, “Apa dan Siapa PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), Surabaya : CV. Perwira Media Nusantara (PMN). 2016.
- Rahman, Hasanuddin, Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis, Contract Drafting, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2003
- Santoso, Urip, *Pejabat Pembuat Akta Tanah : Perspektif, Regulasi, Wewenang dan Sifat Akta*, Cetakan Pertama, Jakarta : Prenamedia Group. 2017.
- Satrio, J. *Hukum Perjanjian*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 1992.
- Sasongko, Wahyu, Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung. 2007.
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Press. 2007
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : CV. Rajawali. 2001.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermedia , 1998.
- Syahrani, Riduan, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung. 1999.
- Sumardjono, Maria S.W, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Cetakan Kedua, Jakarta : Kompas. 2009.
- Soemardjono, Maria SW, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, Jakarta : Buku Kompas. 2005.
- Sunggono, Bambang, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : PT. RajaGrafindo. 2007.
- Sutanta, Gatut, Mudah Mengurus IMB di 55 Kota dan Kabupaten di Indonesia, Jakarta : Raih Asa Sukses, 2009.
- Sutendi, Adrian, Implementasi Prinsip Kepentingan Umum : Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan,Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

UNDANG-UNDANG

- Indonesia, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria.

- Indonesia, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Indonesia, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Indonesia, Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten.
- Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
- Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- Indonesia, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- Indonesia, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- Indonesia, Peraturan Kepala Badan Pertanahan nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
- Subekti, R, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2005.

MAKALAH, ARTIKEL, INTERNET

Abdul Hakim, Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Melalui Kontrak Baku Dan Asas Keadilan dalam Perlindungan Konsumen, Disertasi, Medan, 2013.

<http://leip.or.id/wp-content/uploads/2016/05/Penjelasan-Hukum-Asas-Asas-Umum-Pemerintahan-yang-Baik-Hukum-Administrasi-Negara.pdf>

<http://wartakota.tribunnews.com/2016/11/07/430-bidang-lahan-di-tangsel-dibebaskan-untuk-proyek-tol-serpong-cinere>

https://www.tangerangselatankota.go.id/main/content/index/sejarah_tangsel/6

Jurnal Hukum NO. Edisi Khusus Vol. 18 OKTOBER 2011

Mahadi, Suatu Perbandingan Antara Penelitian Masa Lampau Dengan Sistem Metode Penelitian Dewasa Ini dalam Menemukan Asas-Asas Hukum, Makalah, Kuliah pada Pembinaan Tenaga Peneliti Hukum BPHN, Jakarta, 1980.

